

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Baihaki dan Arif Rachman, 2022, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, hlm. 20.

Baihaki dan Arif Rachman, 2022, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, hlm. 41.

Hans Kelsen .a, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, hlm. 144.

Mohamad Mustari, Taufiq Rahman, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

R. Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-20, PT Intermedia, Jakarta.

Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Setiawan, I. Ketut Oka, 2021, *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.

Weele dan Arjan J Van, 2010, *Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Praticce*, Cengage Learning EMEA, Thomas Rennie Publisher, United Kingdom.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, hlm. 60.

B. Jurnal

Abu Sopian, S. H., and MM Balai Diklat Keuangan Palembang. "Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."

Arman, Et. Al., 2022, "Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat", CIVED, Vol. 9, No. 3, hlm. 358-364..

- Astari dan Leny Diah, et al, 2020 "Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya", JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara, vol. 4, No. 1, hlm. 67.
- Bramantyo, R. Y dan Murti H, et al, 2020. "Penggunaan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, vol. 4, No. 1, hlm. 98.
- Darmawan Sastyo Aji, 2022, "Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar", Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Vol. 1, No. 2, hlm. 130-138.
- Gumanti, Retna, 2012 "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato)", Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 01, hlm. 51-53.
- Harahap, Nurhasiah, 2022 "Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Vol. 3, No. 3, hlm. 598-609.
- Irianto, Sigit. 2013, "Hukum Kontrak dan Perkembangannya." SPEKTRUM HUKUM Vol. 10, No. 1.
- Ismaryadi, Harry, Khairani Khairani, and Yussy Adelina Mannas, 2023 "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah." UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, hlm. 680-694.
- Izatunisa, A. N, dan Aslami, N, 2024, "Analisis Hubungan Procurement pada Manajemen Supply Chain pada PT. Industri Nabati Lestari di Kek Sei Mangke", JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME), Vol. 2, No. 1, hlm. 63-72.
- Jelita Angela Rawis dan Telly Sumbu, Reymen M. Rewah, 2021, "Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut PERPRES Nomor 16 Tahun 2018", Lex Privatum, Vol. 9, No. 1, hlm. 63.
- Kuahaty, Sarah S, 2011, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa." Sasi, Vol. 17, No. 3, hlm. 53-58.
- Lubis, Taufik Hidayat, 2021, "Hukum Perjanjian di Indonesia." SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Vol. 2, No. 3, hlm. 177-190.
- Muhtarom, Muhammad, 2014, "Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak."

Putera, I. G. A. A. ,2015, “Kendala Pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Pengadaan yang Efektif dan Efisien”. Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil, hlm. 9.

Ramadhani, Dwi Aryanti, 2012, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." Jurnal Yuridis Vol. 15, No. 17, hlm. 135-40.

Rawis, Jelita Angela, 2021, "Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurutperpres Nomor 16 Tahun 2018." Lex Privatum, Vol. 9, No. 1.

Rizki Yusititia, Andri Wibowo, 2024, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". Jurnal Hukum Unsrat Vol. 30, No. 2, hlm. 975.

Sinaga, Niru Anita, 2019, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 2.

Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis, 2020, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." Jurnal Mitra Manajemen Vol. 7, No. 2.

Siti Maysarah, 2023, “Efektifitas Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Di PT.Inl”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 21, hlm. 751.

Soedarto, 2010, “Prinsip-prinsip Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Paramita”.

Sven Inggil Anugerah Kretarto dan R. Yuniardi Rusdianto, 2024, “Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang dan Jasa di PT. PLN Nusantara Power Services”, Student Research Journal, Vol. 2, No. 5, hlm. 109.

Tegar, Anugerah M, 2023, "Tahap Proses Pembelian", Jurnal PUSDANSI, Vol.2, No.5.

Yahya Harahap, 1986, “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm. 60.

C. PERATURAN UNDANG-UDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

D. Website

Hukumonline. (2024, May). Kwitansi Sebagai Perjanjian. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-lt4df1d65a2f53c>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (2024, May 5), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>,

Kompasiana, (2025, Januari). Penggunaan Kuitansi Sebagai Alat Bukti yang Sah. <https://www.kompasiana.com/pujayani02/646ec4648221995963266072/penggunaan-kuitansi-sebagai-alat-bukti-yang-sah>.

